

Katalog: 9302020.6372

ISSN 2715-9299

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KOTA BANJARBARU 2019–2023

Volume 8, 2024



<https://banjarbaru.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANJARBARU**

Katalog: 9302020.6372
ISSN 2715-9299

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KOTA BANJARBARU
2019–2023**

Volume 8, 2024

<https://banjarbarukota.bps.go.id>



***BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANJARBARU***

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BANJARBARU

MENURUT PENGELUARAN 2019–2023

Volume 8, 2024

Katalog : 9302020.6372

ISSN : 2715-9299

Nomor Publikasi : 63720.24003

Ukuran Buku : 21,0 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv+82 halaman

Penyusun Naskah :

Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru

Pembuat Cover :

Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru

Penerbit :

©Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru

Sumber Ilustrasi :

Info Publik (<https://infopublik.id/kategori/nusantara/607238/ppkm-kota-banjarbaru-naik-ke-level-3>)

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru.

TIM PENYUSUN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BANJARBARU
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023
Volume 8, 2024**

Pengarah:

Arih Dwi Prasetyo, S.Si

Penanggung Jawab:

Damayanti Indah Nuswantari, SST

Penyunting:

Damayanti Indah Nuswantari, SST

Penulis Naskah:

Damayanti Indah Nuswantari, SST

Nurul Lia Sinta Dewi, SST

Pengolah Data:

Damayanti Indah Nuswantari, SST

Nurul Lia Sinta Dewi, SST

Penata letak:

Damayanti Indah Nuswantari, SST

Desain Sampul:

Nurul Lia Sinta Dewi, SST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran 2019 – 2023 ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Netto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Banjarbaru, April 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Banjarbaru,



Arih Dwi Prasetyo, S.Si

DAFTAR ISI

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BANJARBARU
MENURUT PENGELUARAN 2019—2023
Volume 8, 2024**

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	6
BAB 2. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit Rumah Tangga	12
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18
2.5. Perubahan Inventori	22
2.6. Ekspor dan Impor	26
BAB 3. TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BANJARBARU BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019—2023	29
3.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran	31
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	39
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit Rumah Tangga	44
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	45
3.5. Perkembangan Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	46
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori	48
3.7. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	50

3.8. Perkembangan Impor Barang dan Jasa	51
3.9. Perkembangan Ekspor Impor antar daerah.....	52
BAB 4. PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2019—2023	55
4.1. PDRB (Nominal)	57
4.2. Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	58
4.3. Perbandingan Penggunaan PDRB Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	59
4.4. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB.....	60
4.5. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	61
4.6. Perbandingan PDRB terhadap Impor	62
4.7. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	63
4.8. Neraca Perdagangan.....	64
4.9. <i>Average Propensity to Consume (APC)</i> dan <i>Average Propensity to Save (APS)</i> ..	65
4.10. <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	66
BAB 5. PENUTUP.....	69
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jenis Belanja dan Deflator yang Digunakan 17
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Miliar Rupiah) 32
Tabel 3.2	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Miliar Rupiah) 33
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Persen) 36
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Persen) 37
Tabel 3.5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Persen) 38
Tabel 3.6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Miliar Rupiah) 40
Tabel 3.7	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Banjarbaru, 2019—2023 (persen) 42
Tabel 3.8	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Banjarbaru, 2019—2023 (persen) 43
Tabel 3.9	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Banjarbaru, 2019—2023 44
Tabel 3.10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Banjarbaru, 2019—2023 45
Tabel 3.11	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Banjarbaru, 2019—2023 47
Tabel 3.12	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Banjarbaru, 2019—2023 49
Tabel 3.13	Perkembangan Ekspor Kota Banjarbaru, 2019—2023 50
Tabel 3.14	Perkembangan Impor Kota Banjarbaru, 2019—2023 52

Tabel 3.15	Perkembangan Nilai Ekspor Impor Kota Banjarbaru, 2019—2023	53
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Banjarbaru, 2019—2023	57
Tabel 4.2	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Kota Banjarbaru, 2019—2023	58
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Banjarbaru, 2019—2023	59
Tabel 4.4	Proporsi Total Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Banjarbaru, 2019—2023	60
Tabel 4.5	Rasio Ekspor terhadap PMTB Kota Banjarbaru, 2019—2023	61
Tabel 4.6	Rasio PDRB terhadap Impor Kota Banjarbaru, 2019—2023	62
Tabel 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Banjarbaru, 2019—2023	63
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Banjarbaru, 2019—2023	64
Tabel 4.9	<i>Average Propensity to Consume (APC)</i> dan <i>Average Propensity to Save (APS)</i> Kota Banjarbaru, 2019—2023	66
Tabel 4.10	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Banjarbaru, 2019—2023	67

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 3.1	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Banjarbaru, 2019—2023 (persen)	34
Gambar 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023	34
Gambar 3.3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Miliar Rupiah)	35
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023	38
Gambar 3.5	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Persen)	41

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Milyar Rupiah)	77
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Milyar Rupiah)	78
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Persen)	79
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 = 100 Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Persen)	80
Lampiran 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023	81
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 = 100 Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Persen)	82

BAB I

PENDAHULUAN



Pada tahun 2020 lalu, pandemi yang muncul menuliskan catatan sejarah pada dunia. Serangan Covid-19 memaksa seluruh dunia secara perlahan untuk beradaptasi pada tahun itu. Hal ini dapat dilihat pada berubahnya tatanan kehidupan pada masa pandemi. Perubahan secara nyata dapat dirasakan seluruh dunia pada berbagai aspek, mulai dari interaksi sosial, mekanisme pendidikan, transaksi ekonomi, hingga aktivitas 'leisure' manusia pun harus turut beradaptasi terhadap pandemi.

Pada tahun 2022, aktivitas masyarakat mulai berangsur pulih. Optimisme masyarakat untuk beraktivitas di lingkungan umum tidak berkurang meskipun muncul beberapa varian covid. Kegiatan perkantoran, pasar, rekreasi, dan aktivitas pendidikan mulai berangsur normal seperti sebelum pandemi. Meski demikian, kewaspadaan tetap dilakukan oleh masyarakat. Rutinitas memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak juga masih diberlakukan di sejumlah kawasan publik.

Dampak pandemi dari sisi ekonomi setelah 3 tahun terakhir dapat dilihat salah satunya melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penggunaan standar yang sama dalam penghitungan PDRB di seluruh dunia menjadikan PDRB dapat digunakan sebagai alat perbandingan untuk mengukur kinerja ekonomi antar wilayah.

Selain sebagai alat perbandingan antar wilayah, PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui potensi suatu wilayah. Hal ini menjadi penting karena erat kaitannya dengan arah kebijakan dan pengembangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah setempat agar dapat sesuai dan tepat sasaran.

1.1

PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik yang diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Secara sederhana PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan

harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Adapun tahun dasar yang digunakan pada perhitungan ini adalah tahun 2010.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu :

1. Pendekatan Produksi. Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.
2. Pendekatan pendapatan. PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).
3. Pendekatan Pengeluaran. PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; pembentukan modal tetap bruto; perubahan inventori; dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka PDRB yang sama. Jadi, jumlah PDRB sisi pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan di PDRB lapangan usaha dan harus sama pula dengan PDRB yang merupakan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir baik oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha. Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut.

Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal baik dari domestik maupun impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan dan sisi permintaan barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pendapatan (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai output akhir. Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan riil, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2

KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar daerah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik berupa ekspor maupun impor.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI

DAN

SUMBER DATA



i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Transportasi/Angkutan
8. Komunikasi

9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- a. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings). Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi diri sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik yang dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- b. Barang yang diproduksi dan dipergunakan sendiri.
- c. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
- d. Barang dan jasa yang dibeli langsung (direct purchase) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- a. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- b. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- c. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- d. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-RT bersumber dari :

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- b. Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT)
- c. Jumlah penduduk pertengahan tahun.
- d. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu.
- e. Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (adjustment). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditas tertentu. Hasil penghitungan tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (adjustment) yang dilakukan adalah menyesuaikan Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah perhitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas, untuk memperoleh nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan) :
 - Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke-1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu.
3. Data poin ke-2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP.
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust.
5. Susun Indeks implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP.
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

2.2

PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.

- b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- c. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
- d. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- e. Istilah non profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. Berdasarkan LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Nonprofit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil up-dating direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Estimasi

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- \bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
 i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1,2,3, \dots, 7$
 j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1,2,3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

- X : PK-LNPRT adh Berlaku
 N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3

PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah memiliki peran dan fungsi lain diantaranya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang

dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa)

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) kabupaten/kota mencakup: a). PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; b. PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten/Kota Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu),
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Badan Keuangan Daerah),
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS),
- d. Output Bank Indonesia (Bank Indonesia),
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dari Kementerian Keuangan, serta
- f. Indeks Harga dari BPS.

2. Metoda Penghitungan

a. PK-P kabupaten/kota atas dasar harga berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumus:

<p>PK-P adh Berlaku =</p> <p>Output non pasar – penjualan barang dan jasa + Output Bank Indonesia</p>
--

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/kota, PK-P kabupaten/kota atas dasar harga Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri + pengeluaran akhir pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/ nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

b. PK-P kabupaten/kota atas dasar harga konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, yakni dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator. Adapun deflator yang digunakan adalah sebagai bedapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jenis Belanja dan Deflatornya yang Digunakan

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.4

PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Dalam kaitan ini, investasi yang dimaksud terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada besaran nilai komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI).

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar, aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, seperti bangunan dan konstruksi lain; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas,

seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut lapangan usaha dari BPS Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri kecil dan Rumah tangga (level Kabupaten/Kota).
- d. Laporan Keuangan Perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan dari Direktorat Jenderal Peternakan.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Metode “langsung” dilakukan dengan cara menghitung pembentukan modal (aset tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan “metode tidak langsung” dilakukan berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan

“ arus komoditas ”. Dalam hal ini penyediaan atau “ supply ” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun produk dari luar negeri (impor).

✓ **Pendekatan Langsung:**

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap kategori lapangan usaha. Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya termasuk biaya yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Untuk barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (harga perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga Konstan, maka PMTB atas dasar harga Berlaku di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

✓ **Pendekatan Tidak Langsung:**

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai kategori lapangan usaha (*supply*), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produk domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (atas dasar harga berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di-“*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data control untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Pada penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit lapangan usaha jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survey dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu terlalu lama.

2.5

PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam konteks penghitungan PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB), atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan Inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Perubahan Inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu pencadangan, baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong.

Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif, dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut kategori lapangan usaha, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah :

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau mengunduh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- d. Data Inventori Publikasi tahunan Industri Besar Sedang;
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB kategori terpilih;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia, dan ternak dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

2. Metoda Penghitungan

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

- **Pendekatan Langsung**

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh Berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan.

Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara *men-deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- b. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- c. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan *meng-inflate* perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

- **Pendekatan Tidak Langsung**

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan:

- a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai,
- b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen perubahan Inventori adalah bahwa:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6

EKSPOR DAN IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka serta adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Ragam barang dan jasa yang masuk dalam pasar terkait *supply* dan *demand* diproduksi, serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya

sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut.
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.
- c. Net ekspor daerah adalah selisih antara ekspor antar daerah dan Impor antar daerah.

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber Data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri

dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB Pengeluaran.

<https://banjarbarukota.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BANJARBARU BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2019 – 2023



Kondisi perekonomian di Kota Banjarbaru dari sisi pengeluaran pada umumnya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah perilaku pasar domestik yang tercermin dari komponen yang ada pengeluaran akhir. Peran domestik ini merupakan kekuatan atau daya dorong domestik terhadap perkembangan ekonomi regional. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Dari sisi pengeluaran, dinamika ekonomi yang terjadi tampak dari dinamika masing-masing komponen pengeluaran akhir yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor dan impor serta perubahan inventori. Kelakuan (*behaviour*) komponen pengeluaran tersebut antar waktu dapat menjadi sinyal mengenai apa yang terjadi dalam perekonomian.

Sebagai contoh, dinamika pengeluaran konsumsi rumah tangga, secara tidak langsung dapat menjadi petunjuk mengenai potret kesejahteraan penduduk dalam merespon suatu gejala dalam perekonomian sekaligus dapat menjadi indikasi lesu tidaknya perekonomian suatu daerah. Dinamika pengeluaran pemerintah dapat menjadi sinyal seberapa jauh pengetatan atau pelonggaran kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Sementara dinamika ekspor impor juga tidak kalah penting dalam menunjukkan ekspansi dan skala ekonomi suatu daerah.

3.1

PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Risiko perekonomian global yang kembali meningkat pada 2023 memberikan tantangan bagi upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di tengah prospek penurunan ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Perkembangan positif tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap kuat serta permintaan domestik yang solid seiring dengan peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat. Perbaikan ekonomi sepanjang 2023 ini ditopang oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Banjarbaru.

Perekonomian Kota Banjarbaru menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif dalam kurun waktu 2019 – 2023. Setelah mengalami perlambatan hingga tahun 2020, perekonomian Kota

Banjarbaru sempat berkontraksi menjadi -1,83 persen pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021 seiring pulihnya perekonomian, pertumbuhan ekonomi mencapai angka 3,33 persen. Begitupula pada tahun 2022, perekonomian mulai pulih kembali dengan ditandai pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,93 persen dan mencapai 6,81 persen di tahun 2023. Perlambatan, penurunan, dan peningkatan ekonomi tersebut akan digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan.

Perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2019 mencapai 6,85 persen. Namun, pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru mengalami kontraksi hingga menyentuh angka -1,83 persen, akibat dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 hingga 2023, perekonomian Banjarbaru berangsur pulih, dengan ditandai pertumbuhan ekonomi yang positif yang mencapai 3,33 persen pada tahun 2021; 7,93 persen pada tahun 2022; dan 6,81 persen pada tahun 2023.

Nilai PDRB Kota Banjarbaru atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 13,33 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,54 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 11,79 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha.

Perubahan nilai PDRB atas dasar berlaku ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Perubahan PDRB sisi produksi diikuti oleh perubahan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Pergerakan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Banjarbaru pada periode 2019—2023 dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini.

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rata	4.822,37	4.830,50	4.993,27	5.664,60	6.235,98
2. Konsumsi LNPRT	203,66	198,88	205,34	224,64	257,04
3. Konsumsi Pemerintah	2.308,04	2.316,78	2.513,68	2.598,34	2.905,56
4. PMTB	4.082,63	4.014,71	4.113,81	4.553,49	4.985,23
5. Perubahan Inventori	49,27	2,96	3,88	-40,55	-85,82
6. Ekspor	4.357,03	3.156,76	5.437,81	8.035,04	6.870,15
7. Impor	6.121,90	4.982,14	7.264,70	9.249,17	7.840,04
PDRB	9.701,10	9.538,46	10.003,08	11.786,38	13.328,09

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

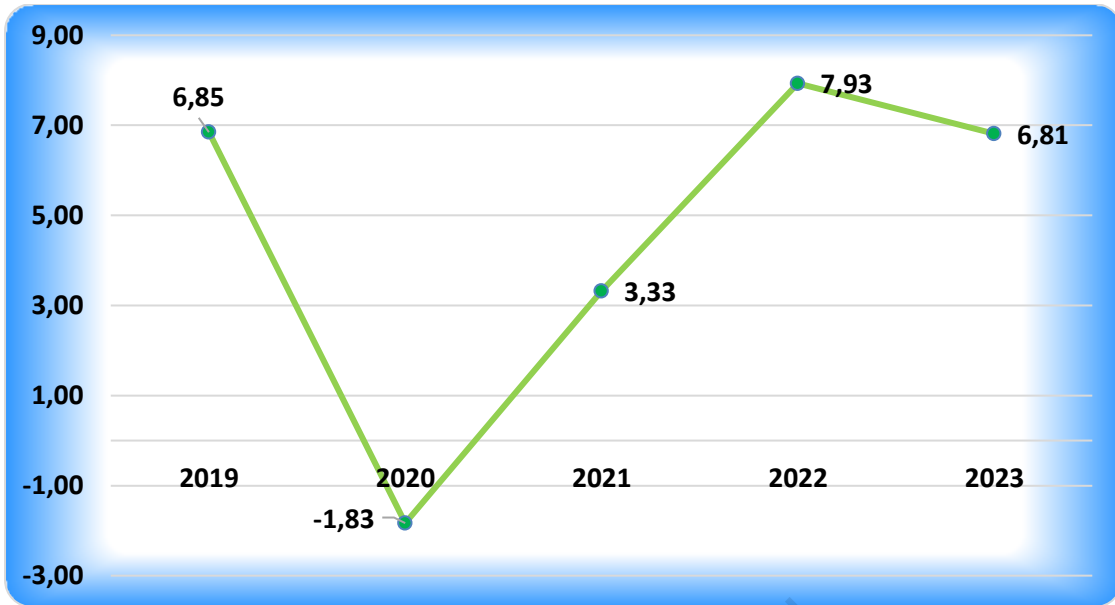
Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. Melalui pendekatan penghitungan harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

**Tabel 3.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rata	3.444,37	3.418,85	3.451,19	3.641,54	3.844,87
2. Konsumsi LNPRT	132,49	127,59	128,74	135,54	147,23
3. Konsumsi Pemerintah	1.431,05	1.389,18	1.470,70	1.454,48	1.570,10
4. PMTB	2.761,12	2.700,00	2.728,46	2.858,34	3.015,20
5. Perubahan Inventori	32,44	2,10	2,74	-25,71	-51,39
6. Ekspor	2.655,96	2.462,97	3.275,09	4.043,55	4.521,30
7. Impor	4.224,76	3.982,31	4.735,07	5.284,47	5.759,12
PDRB	6.232,67	6.118,39	6.321,84	6.823,28	7.288,18

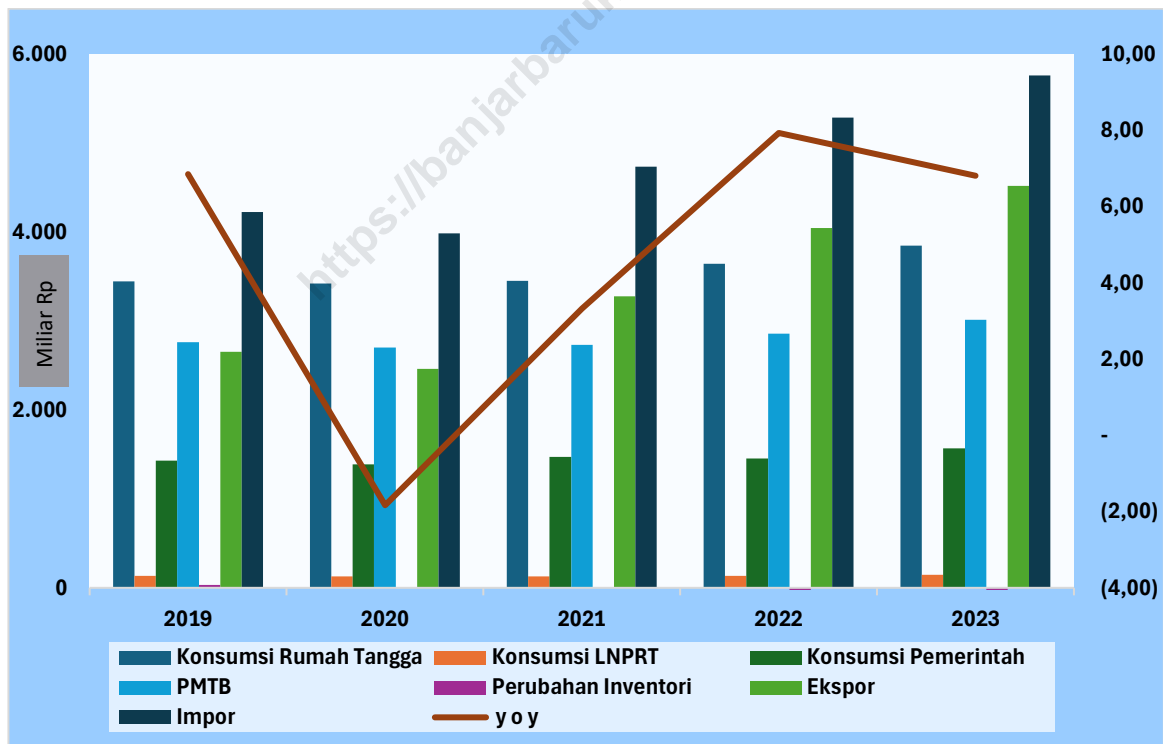
Catatan : * Angka sementara
**Angka sangat sementara

Selama kurun waktu 2019—2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Banjarbaru berdasarkan harga konstan 2010 dapat dilihat pada **Tabel 3.2**. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2023. Pada tahun 2022 nilainya sebesar 6.823,28 miliar rupiah, dan meningkat menjadi 7.288,18 pada tahun 2023. **Gambar 3.1** dibawah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru tetap tumbuh positif pada tahun 2023 sebesar 6,81 persen, melambat dibandingkan tahun 2022 yang mampu mencapai 7,93 persen.



Sumber : BPS 2023 (diolah)

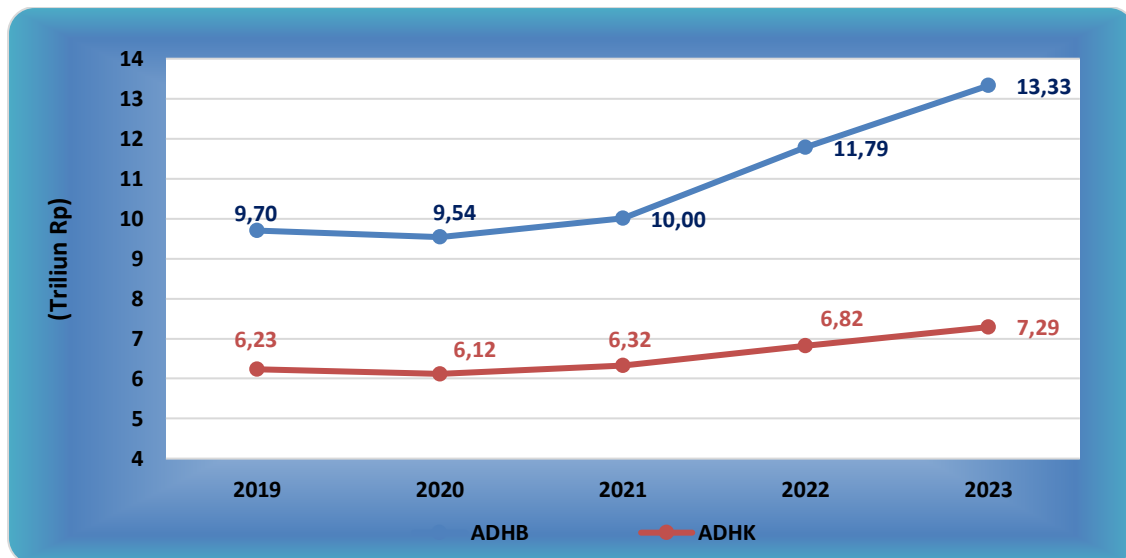
Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Banjarbaru, 2019—2023 (persen)



Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019 – 2023



Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 3.3 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Triliun Rupiah)

Paada **Gambar 3.3**, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sementara pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2023.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Ekspor Neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Pada **Tabel 3.3** terlihat bahwa selama periode 2019 – 2023, sebagian besar yakni sekitar 48 - 51 persen PDRB Kota Banjarbaru digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Disamping itu pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 37 – 42 persen.

Pada **Tabel 3.3** juga terlihat bahwa selama periode 2019—2023 bahwa produk yang diproduksi di wilayah domestik tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi net ekspor yang berada pada kisaran nilai -7,28 persen hingga -

19,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan perdagangan internasional dan regional Kota Banjarbaru dalam periode tahun 2019—2023 selalu dalam posisi defisit.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Ruta	49,71	50,64	49,92	48,06	46,79
2. Konsumsi LNPRT	2,10	2,09	2,05	1,91	1,93
3. Konsumsi Pemerintah	23,79	24,29	25,13	22,05	21,80
4. PMTB	42,08	42,09	41,13	38,63	37,40
5. Perubahan Inventori	0,51	0,03	0,04	-0,34	-0,64
6. Net Ekspor	-18,19	-19,14	-18,26	-10,30	-7,28
Ekspor	44,91	33,10	54,36	68,17	51,55
Dikurangi Impor	63,11	52,23	72,62	78,47	58,82
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Komponen ekspor selama periode 2019—2023 berkontribusi sekitar 33,10 – 68,17 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB sisi pengeluaran berkontribusi lebih besar, yakni sekitar 52,23 – 78,47 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Sebagian dari produk yang diproduksi di wilayah domestik juga masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir dan pengeluaran untuk kapital (PMTB). Selama periode 2019—2023, pengeluaran untuk konsumsi akhir, baik konsumsi akhir rumah tangga, LNPRT, maupun pemerintah memiliki kontribusi sekitar 70,52 – 77,10 persen. Konsumsi akhir terbesar masih digerakkan oleh konsumsi akhir rumah tangga dengan kontribusi antara 48,06 – 50,64 persen, kemudian dilanjutkan dengan konsumsi akhir pemerintah berkisar antara 21,80 – 25,13 persen dan konsumsi akhir LNPRT antara 1,91 – 2,10 persen. Sementara pengeluaran untuk kapital (PMTB) mempunyai peran relatif besar, yakni sekitar 37,40 – 42,09 persen.

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rata	4,42	-0,74	0,95	5,52	5,58
2. Konsumsi LNPRT	8,72	-3,70	0,90	5,29	8,62
3. Konsumsi Pemerintah	3,39	-2,93	5,87	-1,10	7,95
4. PMTB	8,18	-2,21	1,05	4,76	5,49
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,85	-1,83	3,33	7,93	6,81

Catatan : * Angka sementara

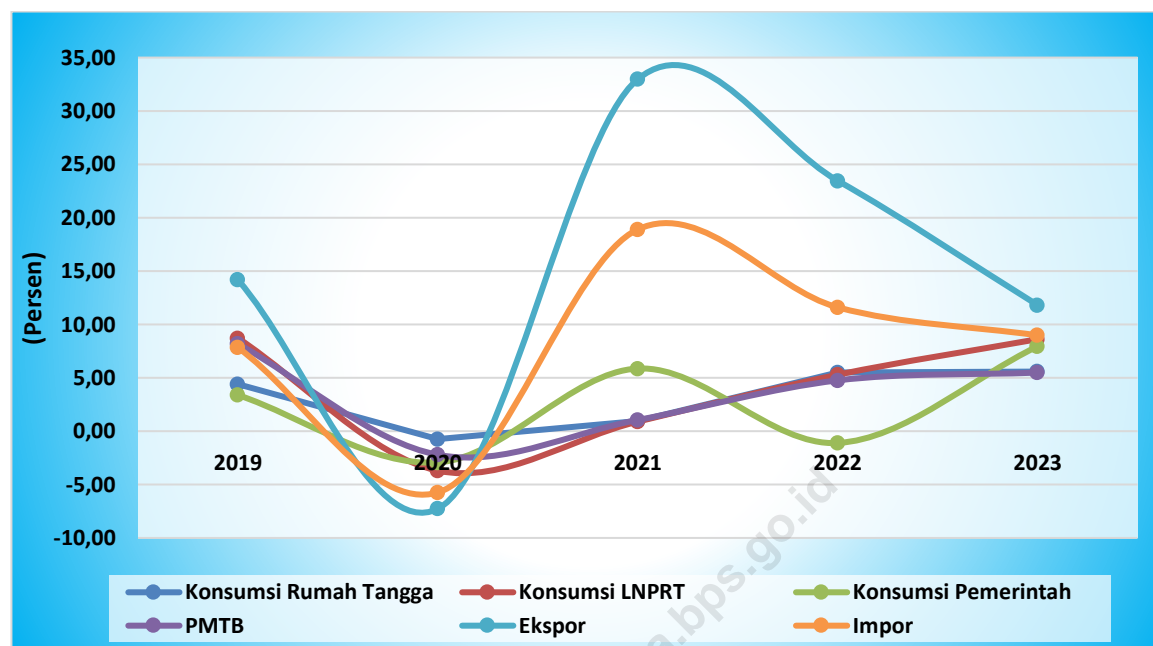
**Angka sangat sementara

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi pada suatu wilayah. Kontraksi yang terjadi pada perekonomian tahun 2020 merupakan pertama kalinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif. Masifnya pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat baik nasional maupun internasional jelas berpengaruh signifikan terhadap perekonomian.

Selama kurun lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru dari tahun 2019—2023 secara rata-rata mencapai 4,62 persen, dengan masing-masing pertumbuhan pada setiap tahun sebesar 6,85 persen (2019); -1,83 persen (2020); 3,33 persen (2021); dan 7,93 persen (2022); dan 6,81 persen (2023). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar 7,93 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-1,83 persen).

Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen pada tahun 2023 kembali bertumbuh positif. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,58 persen; konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 8,62 persen; Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 7,95 persen; dan PMTB tumbuh 5,49 persen. Strategi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang terus dilakukan pemerintah menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi pada tahun 2022. Perdagangan internasional pun terus mencatatkan kinerja impresif, ditopang pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas. Strategi kebijakan Pemerintah pasca pandemi turut memberikan

kontribusi positif. Selain itu, terjaganya ketersediaan pasokan dalam daerah juga menjadi kunci menjaga momentum ekspor di tengah kenaikan harga.



Catatan : * Angka sementara
**Angka sangat sementara

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Persen)

Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	140,01	141,29	144,68	155,55	162,19
2. Konsumsi LNPRT	153,71	155,88	159,51	165,73	174,59
3. Konsumsi Pemerintah	161,28	166,77	170,92	178,64	185,06
4. PMTB	147,86	148,69	150,77	159,31	165,34
5. Ekspor	164,05	128,17	166,04	198,71	151,95
6. Impor	144,91	125,11	153,42	175,03	136,13
PDRB	155,65	155,90	158,23	172,74	182,87

Catatan : * Angka sementara
**Angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Secara rata-rata, indeks implisit menunjukkan peningkatan. Hampir semua komponen mengalami kenaikan harga kecuali komponen ekspor dan impor yang mengalami fluktuasi harga. Pergerakan harga barang dan jasa yang dikonsumsi pemerintah paling tinggi diantara barang dan jasa untuk kepentingan lain. Sementara itu, selama kurun waktu tahun 2019—2023 indeks implisit terendah adalah pada komponen ekspor.

Tujuan penghitungan indeks implisit adalah untuk melihat pertumbuhan harga dibandingkan tahun dasar. Indeks implisit sebesar 155,65 pada tahun 2019; 155,90 pada tahun 2020; 158,23 pada tahun 2021; 172,74 persen pada tahun 2022; dan 182,87 persen pada tahun 2023. Kumulatif kenaikan harga PDRB Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2019—2023 adalah 27,22.

3.2

PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) menempati porsi relatif besar dalam PDRB pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Banjarbaru ternyata sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Banjarbaru maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Besarnya porsi PKRT dalam PDRB menunjukkan bahwa perekonomian Kota Banjarbaru sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Kondisi tersebut di satu sisi dapat mendorong perekonomian sepanjang daya beli penduduk terjaga.

PKRT Kota Banjarbaru dilihat dari besarnya share dalam PDRB, nilainya sekitar 46 - 51 persen. Tentunya pengaruhnya cukup besar dalam perekonomian Kota Banjarbaru. Di sisi lain, besarnya porsi PKRT dalam PDRB tersebut juga menjadi tantangan jika tidak diimbangi produksi lokal yang setara.

Data pada **Tabel 3.6** menunjukkan bahwa pada tahun 2023 peranan pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mencapai 46,79 persen, cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai 48,06 persen. Dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan), pengeluaran konsumsi rumahtangga menunjukkan peningkatan. Pada dasarnya, kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Miliar Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Konsumsi Rumah Tangga</u>					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.822,37	4.830,50	4.993,27	5.664,60	6.235,98
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.444,37	3.418,85	3.451,19	3.641,54	3.844,87
Proporsi terhadap PDRB (persen ADHB)	49,71	50,64	49,92	48,06	46,79
<u>Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (Ribu Rp)</u>					
a. ADHB	18.517,18	19.169,35	19.401,19	21.560,13	23.259,39
b. ADHK 2010	13.225,86	13.567,37	13.409,49	13.860,14	14.340,87
<u>Pertumbuhan</u>					
a. Total konsumsi RT	4,42	-0,74	0,95	5,52	5,58
b. Perkapita	2,49	2,58	-1,16	3,36	3,47
Jumlah penduduk	260.427	251.991	257.369	262.735	268.106

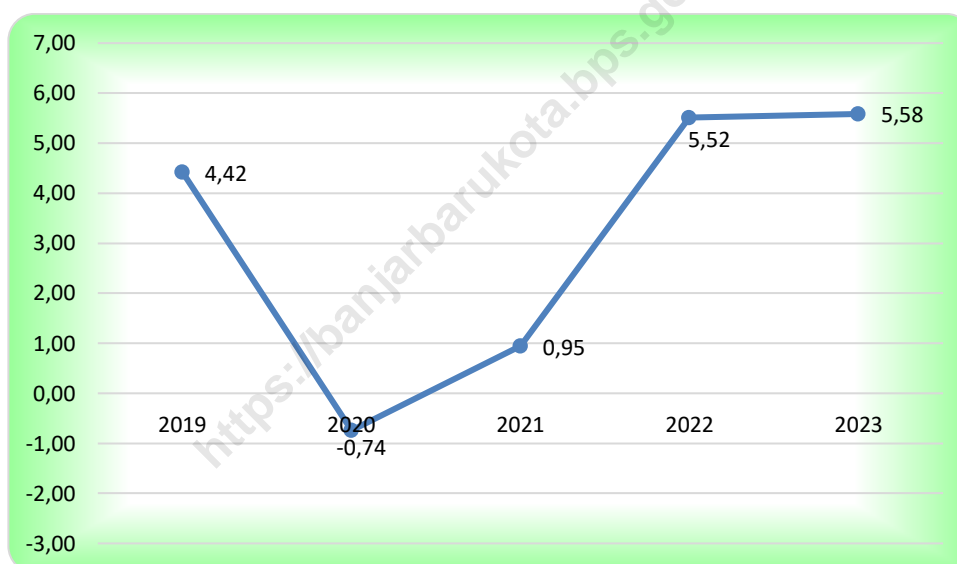
Catatan : * Angka sementara
 **Angka sangat sementara

Selama periode tahun 2019—2023, PDRB Kota Banjarbaru sekitar 46,79 – 50,64 persen digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB terendah terjadi pada tahun 2023, yaitu 46,79 persen. Dimana porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga turun 1,27 poin dibanding tahun 2022.

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada

tahun 2019, atas dasar harga berlaku setiap rumahtangga di Kota Banjarbaru menghabiskan dana sekitar 18,52 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat 19,17 juta Rupiah (2020); 19,40 juta Rupiah (2021); 21,56 juta Rupiah (2022), dan 23,26 juta Rupiah (2023). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010=100) rata-rata konsumsi per kapita tumbuh pada kisaran 2 persen, kecuali tahun 2021 yang menunjukkan penurunan 1,16 persen. Pertumbuhan konsumsi rata perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 3,47 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi rumah tangga per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas).



Catatan : * Angka sementara
 **Angka sangat sementara

Gambar 3.5 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Banjarbaru, 2019—2023 (Persen)

Pada tahun 2019 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 4,42 persen. Kemudian, berturut-turut -0,74 persen (2020); 0,95 persen (2021); dan 5,52 persen (2022); dan 5,58 persen (2023). Sementara itu rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 2,49 persen (2019); 2,58 persen (2020); -1,16 persen (2021); 3,36 persen (2022); dan 3,47 persen (2023). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada pertumbuhan riil konsumsi akhir rumah tangga, terutama pada tahun 2021.

Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga ini mencapai 5,58 persen. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara global di Kota Banjarbaru.

Tabel 3.7 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Banjarbaru, 2019—2023 (persen)

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,02	0,34	0,51	5,12	4,88
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,83	-1,90	0,55	2,05	3,29
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,87	3,78	1,75	2,90	3,20
d. Kesehatan & Pendidikan	3,29	4,11	3,78	4,15	4,67
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,08	-5,76	0,16	8,79	8,04
f. Hotel & Restoran	4,98	-2,30	2,92	8,62	9,79
g. Lainnya	3,03	-1,97	-0,30	3,31	4,99
Pertumbuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4,42	-0,74	0,95	5,52	5,58

Catatan : * Angka sementara
**Angka sangat sementara

Pertumbuhan komponen konsumsi akhir rumah tangga Kota Banjarbaru selama kurun waktu 2019—2023 cukup berfluktuatif. Pada awal periode ditandai dengan pertumbuhan yang positif, kemudian sempat berkontraksi pada tahun 2020, dan mulai pulih pada tahun berikutnya (**Tabel 3.7**). Pada tahun 2019—2023 ditandai dengan pertumbuhan positif pada tahun 2019 sebesar 4,42 persen. Sementara pada tahun 2020, pertumbuhan mengalami kontraksi menjadi -0,74 persen. Adapun kontraksi pada tahun 2020 ini diakibatkan adanya masa pandemi COVID-19 yang memicu munculnya kebijakan-kebijakan yang menekan peningkatan konsumsi akhir rumah tangga, seperti adanya PSBB pada awal pandemi, kebijakan bekerja dan bersekolah dari rumah, dan larangan mudik pada musim hari raya, terutama untuk Aparatur Sipil Negara. Namun, pada tahun selanjutnya, dengan pertumbuhan pada komponen akhir konsumsi rumah tangga ini

menunjukkan peningkatan, dengan pertumbuhan yang mencapai 0,95 persen (2021); 5,52 persen (2022); dan 5,58 persen (2023).

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit disajikan dalam **Tabel 3.8** di bawah. Tabel ini menunjukkan pertumbuhan implisit (indeks harga) setiap tahunnya pada periode tahun 2019—2023 untuk setiap subkomponen konsumsi akhir rumah tangga. Rata rata pertumbuhan indeks harga dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 3,80 persen dimana tahun 2020 mencapai inflasi terendah sebesar 0,92 persen.

Pada tahun 2023, hampir seluruh indeks harga subkomponen penggunaan konsumsi akhir rumah tangga masih tumbuh positif, namun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.8 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Banjarbaru, 2019—2023 (persen)

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,36	1,31	2,76	7,97	5,35
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,38	2,04	2,72	5,94	1,43
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,16	0,70	0,80	5,51	3,54
d. Kesehatan & Pendidikan	3,87	3,92	3,08	2,10	1,95
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,64	-1,57	1,55	10,77	4,40
f. Hotel & Restoran	4,11	1,74	3,40	6,93	2,86
g. Lainnya	5,28	1,87	3,17	6,36	3,83
Pertumbuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	3,89	0,92	2,40	7,51	4,27

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

3.3

PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Komponen konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minim peranannya dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Meskipun demikian, dalam perekonomian suatu wilayah, LNPRT tetap memiliki peranan yang penting.

Selain aktivitas Partai Politik, LNPRT juga merekam aktivitas komunitas lainnya, seperti Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Organisasi Kebudayaan dan Lembaga Keagamaan. Termasuk disini aktivitas tempat ibadah berupa masjid, gereja, pura, dan lainnya.

Tabel 3.9 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT, Kota Banjarbaru, 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	203,66	198,88	205,34	224,64	257,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	132,49	127,59	128,74	135,54	147,23
Pertumbuhan (<i>ADHK 2010</i>)	8,72	-3,70	0,90	5,29	8,62
Proporsi terhadap PDRB (persen ADHB)	2,10	2,09	2,05	1,91	1,93

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2019—2023 mengalami kecenderungan meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 203,66 miliar rupiah, kemudian turun menjadi 198,88 miliar rupiah (2020); dan meningkat kembali menjadi 205,34 miliar rupiah (2021); 224,64 miliar rupiah (2022); dan 257,04 miliar rupiah (2023). Pertumbuhan pengeluaran

konsumsi LNPRT selama periode tahun 2019—2023 berturut-turut adalah 8,72 persen (2019); - 3,70 persen (2020); 0,90 persen (2021); 5,29 persen (2022); dan 8,62 persen (2023).

Sekitar dua persen dari PDRB Kota Banjarbaru digunakan untuk pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga seperti panti asuhan, partai politik, lembaga keagamaan, LSM, dan lain- lain. Meskipun mengambil porsi 1,91 hingga 2,10 persen, keberadaan LNPRT tetap memiliki andil terhadap pembentukan PDRB di Kota Banjarbaru.

3.4

PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Pada PDRB Pengeluaran, selain konsumsi rumah tangga dan LNPRT, konsumsi akhir pemerintah termasuk bagian dari konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah. Pemerintah merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran ganda, disamping sebagai produsen jasa, pemerintah juga bertindak sebagai konsumen serta regulator dalam proses perekonomian.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Kota Banjarbaru sebagai upaya tanggap dampak pandemi Covid-19 adalah *refocussing* anggaran, yakni optimalisasi penggunaan APBD diprioritaskan untuk antisipasi dan percepatan penanganan dampak penularan Covid-19. Beberapa realisasi penggunaannya seperti pemenuhan kebutuhan rumah sakit daerah, pengadaan masker, *hand sanitizer*, *thermal gun* yang sesuai standar Kementerian Kesehatan.

Tabel 3.10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Banjarbaru, 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.308,04	2.316,78	2.513,68	2.598,34	2.905,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.431,05	1.389,18	1.470,70	1.454,48	1.570,10
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	23,79	24,29	25,13	22,05	21,80
Pertumbuhan	3,39	-2,93	5,87	-1,10	7,95

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.308,04 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 2.316,78 miliar rupiah (2020); 2.513,68 miliar rupiah (2021); 2.598,34 miliar rupiah (2022); dan 2.905,56 miliar rupiah (2023). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019—2023 pada masing-masing tahun (kecuali tahun 2020 dan 2022). Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB selama periode 2019—2023 juga mengalami penurunan, dimana dari 23,79 persen (tahun 2019) menjadi 21,80 persen (tahun 2023). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 22,05 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Adapun pertumbuhan tertinggi dalam periode tahun 2019—2023 terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 7,95 persen.

3.5

PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari

berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019—2023 berfluktuasi dari 8,18 persen (2019) menjadi 5,49 persen (2023), sementara di tahun lainnya masing-masing -2,21 persen (2020); 1,05 persen (2021); dan 4,76 persen (2023).

**Tabel 3.11 Perkembangan dan Struktur PMTB
Kota Banjarbaru, 2019—2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.082,63	4.014,71	4.113,81	4.553,49	4.985,23
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.761,12	2.700,00	2.728,46	2.858,34	3.015,20
Proporsi terhadap PDRB (persen DHB)	42,08	42,09	41,13	38,63	37,40
Struktur PMTB					
a. Bangunan					
(Miliar Rp)	3.242,20	3.190,19	3.262,90	3.556,65	3.844,87
(Persen)	79,41	79,46	79,32	78,11	77,13
b. Non Bangunan					
(Miliar Rp)	840,44	824,52	850,91	996,84	1.140,36
(Persen)	20,59	20,54	20,68	21,89	22,87
Total PMTB					
(Miliar Rp)	4.082,63	4.014,71	4.113,81	4.553,49	4.985,23
(Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (persen)					
a. Bangunan	8,48	-2,10	1,88	3,75	4,82
b. Non Bangunan	6,92	-2,70	-2,52	9,33	8,34
Total PMTB	8,18	-2,21	1,05	4,76	5,49

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Selain peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 untuk komponen konsumsi akhir (rumah tangga dan LNPR), PMTB juga menunjukkan peningkatan untuk data atas dasar harga konstan. Meskipun begitu, PMTB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 menunjukkan adanya

¹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

peningkatan dibanding tahun sebelumnya (**Tabel 3.11**). Data pada tabel ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan proporsi PMTB dalam PDRB selama kurun waktu 2019—2023 relatif stabil di kisaran 37,40 – 42,09 persen.

PMTB yang disajikan pada PDRB Pengeluaran terpilah menurut dua subkomponen, yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Subkomponen Bangunan merupakan subkomponen dengan porsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto. Sama halnya dengan pertumbuhan PMTB pada subkomponen Bangunan yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2023, pertumbuhan pada PMTB subkomponen Non Bangunan juga mengalami peningkatan pada tahun ini.

Dalam kurun lima tahun terakhir, pertumbuhan pada subkomponen PMTB Bangunan diakhiri dengan adanya pertumbuhan positif pada tahun 2023 yang mencapai 4,82 persen, meski sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020, hingga menyentuh -2,10 persen. Pertumbuhan tertinggi PMTB Bangunan terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,48 persen. Sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -2,10 persen.

Sementara itu, pertumbuhan pada subkomponen PMTB Non Bangunan dalam kurun lima tahun terakhir diakhiri dengan adanya peningkatan pada tahun 2023. Pada tahun 2019 pertumbuhan PMTB Non Bangunan masih positif, yakni sebesar 6,92 persen. Sementara pada tahun 2020, pertumbuhan PMTB Non Bangunan mengalami kontraksi sebesar -2,70 persen. Begitupula pada tahun 2021, pertumbuhan subkomponen ini masih mengalami kontraksi, sebesar -2,52 persen. Pada dua tahun berikutnya, subkomponen ini mengalami pertumbuhan positif yang sangat tinggi, yakni mencapai 9,33 persen tahun 2022 dan 8,34 persen tahun 2023.

Secara total, selama kurun waktu tahun 2019 – 2023, pertumbuhan PMTB Total Bangunan dan Non Bangunan menunjukkan pertumbuhan yang positif, yakni 5,49 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 8,18 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -2,21 persen.

3.6

PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi,

konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat pada komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Tabel 3.12 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Banjarbaru, 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	49,27	2,96	3,88	-40,55	-85,82
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	32,44	2,10	2,74	-25,71	-51,39
Proporsi terhadap PDRB (persen)	0,51	0,03	0,04	-0,34	-0,64

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perubahan inventori atas dasar harga berlaku mencapai nominal tertinggi pada tahun 2019, yakni sebesar 49,27 miliar rupiah. Titik terendah dari nilai perubahan inventori terdapat pada tahun 2023, yakni mencapai -85,82 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Banjarbaru mengalami fluktuasi. Adapun proporsi perubahan inventori adalah 0,51 persen (2019); 0,03 persen (2020); 0,04 persen (2021); -0,34 persen (2022); dan -0,64 persen (2023). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2019, yakni 0,51 persen.

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Selama tahun 2019 – 2023, besarnya kontribusi perubahan inventori dalam PDRB Kota Banjarbaru secara rata-rata hanya sebesar -0.08 persen per tahun.

3.7

PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 3.13 Perkembangan Ekspor Kota Banjarbaru, 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.357,03	3.156,76	5.437,81	8.035,04	6.870,15
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.655,96	2.462,97	3.275,09	4.043,55	4.521,30
Proporsi terhadap PDRB (persen)	44,91	33,10	54,36	68,17	51,55
Pertumbuhan ²	14,17	-7,27	32,97	23,46	11,81

Catatan : * Angka sementara
 **Angka sangat sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2019—2023 nilai ekspor barang dan jasa pada akhir periode memiliki kecenderungan meningkat dibandingkan saat awal periode. Pada tahun 2019

² Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

nilai ekspor barang dan jasa sebesar 4,36 triliun rupiah dan meningkat menjadi sebesar 6,87 triliun rupiah pada tahun 2023. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil”.

Proporsi ekspor barang dan jasa dalam PDRB pada periode 2019—2023 menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 44,91 persen pada tahun 2019 menjadi 51,55 persen di tahun 2023. Pada tahun 2020, proporsi nilai ekspor barang dan jasa dalam PDRB berada pada nilai terendah yakni 33,10 persen, akibat wabah pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun tersebut.

3.8

PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. Kebutuhan konsumsi (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor bisa jadi tidak terpenuhi oleh kemampuan domestik sehingga sebagian dipenuhi dari impor. Karena PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Banjarbaru, maka untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB Pengeluaran (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (kategori).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Banjarbaru di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pola perkembangan impor pada PDRB Pengeluaran Kota Banjarbaru yang cukup berfluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) dalam kurun tahun 2019—2023. Pada tahun 2019 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku sebesar 6,12 triliun rupiah turun menjadi 4,98 triliun rupiah

tahun 2020, meningkat kembali menjadi 7,26 triliun rupiah tahun 2021, meningkat menjadi 9,24 triliun rupiah tahun 2022, dan menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 7,84 triliun rupiah.

Tabel 3.14 Perkembangan Impor Kota Banjarbaru, 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	6.121,90	4.982,14	7.264,70	9.249,17	7.840,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4.224,76	3.982,31	4.735,07	5.284,47	5.759,12
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	63,11	52,23	72,62	78,47	58,82
Pertumbuhan ³	7,83	-5,74	18,90	11,60	8,98

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Pada tahun 2019, proporsi impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 63,11 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi sebesar 52,23 persen pada tahun 2020 dan 72,62 persen pada tahun 2021. Pada tahun selanjutnya, kontribusi impor barang dan jasa menunjukkan peningkatan mencapai 78,47 persen pada tahun 2022, dan 58,82 persen pada tahun 2023.

3.9

PERKEMBANGAN NET EKSPOR IMPOR

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut.

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadi penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu : ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki dua angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel *Input-Output* “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

**Tabel 3.15 Perkembangan Nilai Ekspor Impor
Kota Banjarbaru, 2019—2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor-Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	-1.764,86	-1.825,38	-1.826,89	-1.214,13	-969,89
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-1.568,80	-1.519,34	-1.459,99	-1.240,92	-1.237,82
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.357,03	3.156,76	5.437,81	8.035,04	6.870,15
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.655,96	2.462,97	3.275,09	4.043,55	4.521,30
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	6.121,90	4.982,14	7.264,70	9.249,17	7.840,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4.224,76	3.982,31	4.735,07	5.284,47	5.759,12

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA BANJARBARU 2019 – 2023



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, ditengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Banjarbaru di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Banjarbaru, 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
- ADHB	9.701,10	9.538,46	10.003,08	11.786,38	13.328,09
- ADHK 2010	6.232,67	6.118,39	6.321,84	6.823,28	7.288,18
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)					
- ADHB	37,25	37,85	38,87	44,86	49,12
- ADHK 2010	23,93	24,28	24,56	25,97	27,18
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (Persen)	4,87	1,45	1,17	5,73	4,67
Jumlah Penduduk (Orang)	260.427	251.991	257.369	262.735	268.106

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber : Jumlah Penduduk tahun 2018 (Proyeksi SP 2010), 2019-2020 (SUPAS 2015), 2021-2023 (Proyeksi SP 2020)

Nilai PDRB Kota Banjarbaru atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 13.328,09 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 1.541,71 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 11.786,38 miliar rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 6.232,67 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 7.288,18 miliar rupiah pada tahun 2023.

Dua tahun sejak terjadinya pandemi pada tahun 2020, aktivitas perekonomian Kota Banjarbaru mulai kembali normal. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengeluaran masyarakat untuk konsumsi akhir (rumah tangga, LNPR, maupun pemerintah), pembentukan modal tetap bruto dan perubahan, serta aktivitas ekspor dan impor inventori suatu wilayah.

4.2

PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Data PDRB menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Banjarbaru, ternyata sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selama periode 2019—2023, konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi atau peran secara rata-rata sebesar 49,02 persen per tahun.

Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Kota Banjarbaru, 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rupiah)	4.822,37	4.830,50	4.993,27	5.664,60	6.235,98
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rupiah)	4.357,03	3.156,76	5.437,81	8.035,04	6.870,15
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor	1,11	1,53	0,92	0,70	0,91
Rata - rata Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor			1,03		

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Data rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor di atas menunjukkan bahwa di Kota Banjarbaru selama periode 2019—2023 produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga

adalah sebesar 1,03 kali nilai ekspor. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan ekspor. Rasio tersebut mengalami peningkatan di tahun 2023 hingga ke level 0,91 seiring dengan menurunnya nilai ekspor, yang secara implisit menjelaskan bahwa pasca pandemi, nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat, dan nilai ekspor mengalami penurunan. Disamping itu, nilai perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor sebesar 0,91 dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 ekspor masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi akhir rumah tangga.

4.3

PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Banjarbaru digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Banjarbaru, 2018 – 2022

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) (Miliar Rupiah)	4.822,37	4.830,50	4.993,27	5.664,60	6.235,98
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rupiah)	4.082,63	4.014,71	4.113,81	4.553,49	4.985,23
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	1,18	1,20	1,21	1,24	1,25
Rata-rata Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB			1,22		

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB tercatat stabil dengan rata-rata 1,22 per tahun selama periode 2019—2023 . Pada tahun 2023 perbandingan konsumsi terhadap PMTB

sebesar 1,25 yang berarti bahwa penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 1,25 kali lebih besar dibanding untuk PMTB.

4.4

PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 4.4 Proporsi Total Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kota Banjarbaru, 2019—2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rupiah)	7.334,07	7.346,16	7.712,29	8.487,58	9.398,58
a. Rumah Tangga	4.822,37	4.830,50	4.993,27	5.664,60	6.235,98
b. LNPRT	203,66	198,88	205,34	224,64	257,04
c. Pemerintah	2.308,04	2.316,78	2.513,68	2.598,34	2.905,56
PDRB (ADHB) (Miliar Rupiah)	9.701,10	9.538,46	10.003,08	11.786,38	13.328,09
Proporsi (Persen)	75,60	77,02	77,10	72,01	70,52
Rata-rata Proporsi (Persen)	74,45				

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir, secara rata-rata sebesar 74,45 persen pada periode 2019—2023. Ini berarti bahwa sebagian besar barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Total konsumsi akhir pada tahun 2023 mencapai 9.398,58 miliar rupiah atau 70,52 persen dari total PDRB. Pada tabel di atas, terlihat bahwa pada konsumsi akhir tahun 2023 terjadi peningkatan secara nominal jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, namun kontribusi konsumsi akhir terhadap total PDRB Kota Banjarbaru pada tahun 2023 mengalami penurunan.

4.5

PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB
Kota Banjarbaru, 2019—2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rupiah)	4.357,03	3.156,76	5.437,81	8.035,04	6.870,15
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rupiah)	4.082,63	4.014,71	4.113,81	4.553,49	4.985,23
Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	1,07	0,79	1,32	1,76	1,38

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun rasio ekspor terhadap PMTB menunjukkan tren fluktuatif seiring dengan besaran ekspor yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2023 nilai ekspor Kota Banjarbaru mempunyai nilai yang lebih tinggi hingga melebihi PMTB, terlihat dari rasionya yang berada diatas angka 1, yakni 1,38.

4.6

PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor (luar negeri dan luar kabupaten). Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara dan daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, berlaku sebaliknya.

Tabel 4.6 Rasio PDRB terhadap Impor Kota Banjarbaru, 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rupiah)	9.701,10	9.538,46	10.003,08	11.786,38	13.328,09
Total Impor (ADHB) (Miliar Rupiah)	6.121,90	4.982,14	7.264,70	9.249,17	7.840,04
Perbandingan PDRB terhadap Impor	1,58	1,91	1,38	1,27	1,70
Rata-rata Perbandingan PDRB terhadap Impor			1,57		

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Rasio PDRB terhadap impor secara umum nilainya fluktuatif, dimana sejak tahun 2019 hingga 2021 sempat menunjukkan pola peningkatan, namun di tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan hingga ke level 1,38 dan 1,27. Rasio ini meningkat kembali pada tahun 2023 hingga mencapai 1,70. Hal tersebut mengindikasikan bertambahnya ketergantungan PDRB Kota Banjarbaru terhadap produk-produk impor yang dihasilkan dari luar wilayah untuk memenuhi permintaan domestiknya.

4.7

KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari **Tabel 3.22**, dapat dilihat bahwa selama periode 2019—2023, untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian besar produk yaitu sekitar 34 – 44 persen masih harus didatangkan dari luar Kota Banjarbaru. Sementara sisanya yaitu sekitar 56 – 66 persen dapat dipenuhi dari hasil produksi domestik.

Pada tahun 2022 penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik adalah sebesar 11.788,18 miliar rupiah. Oleh karena produk domestik tersebut tidak mampu mencukupi, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor dari luar Kota Banjarbaru, dengan nilai sebesar 9.266,89 miliar rupiah.

Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Banjarbaru, 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (Miliar Rupiah)	9.701,10	9.538,46	10.003,08	11.786,38	13.328,09
Persentase (%)	61,31	65,69	57,93	56,03	62,96
Total Nilai Impor ADHB (Miliar Rupiah)	6.121,90	4.982,14	7.264,70	9.249,17	7.840,04
Persentase (%)	38,69	34,31	42,07	43,97	37,04
Total Permintaan Akhir (Miliar Rupiah)	15.823,00	4.520,59	17.267,8	21.035,6	21.168,1
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Secara umum total permintaan akhir masyarakat mengalami tren meningkat hingga tahun 2023 mencapai angka 21.168,1 miliar rupiah. Angka tersebut sempat anjlok di tahun 2020 menjadi 14.520,59 miliar rupiah disebabkan oleh kondisi pandemi yang secara tidak langsung menurunkan

permintaan masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut sudah membaik pada tahun berikutnya hingga tahun 2023.

4.8

NERACA PERDAGANGAN

Transaksi valuta yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran valuta masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran valuta keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga, maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu daerah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Kota Banjarbaru, 2019—2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rupiah)	4.357,03	3.156,76	5.437,81	8.035,04	6.870,15
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rupiah)	6.121,90	4.982,14	7.264,70	9.249,17	7.840,04
Net Ekspor (X-M) (Miliar Rupiah)	-1.764,86	-1.825,38	-1.826,89	-1.214,13	-969,89
Rasio Ekspor terhadap Impor	0,71	0,63	0,75	0,87	0,88

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

Selama periode 2019—2023 , posisi rasio perdagangan barang dan jasa kota Banjarbaru dengan luar negeri serta provinsi dan kabupaten/kota lain selalu menunjukkan nilai dibawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan barang dan jasa kota Banjarbaru selalu dalam posisi defisit. Defisit perdagangan Kota Banjarbaru yang terjadi pada tahun 2019 mencapai 1.764,86 miliar rupiah, sedangkan 2023 tercatat defisit sebesar 969,89 miliar rupiah.

4.9

AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME (APC) DAN AVERAGE PROPENSITY TO SAVE (APS)

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan.

Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$\text{APS} = \frac{S}{Y_d} \quad \text{APC} = \frac{C}{Y_d}$$

Di mana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan Y_d = Pendapatan disposabel. Perlu diketahui pula bahwa $\text{APC} + \text{APS} = 1$.

Selama periode 2019—2023 , nilai APC yang mengimplikasikan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi mengalami tren menurun dari 0,76 pada tahun 2019 menjadi 0,71 pada tahun 2023. Sebaliknya, APS yang mengimplikasikan kecenderungan untuk menabung mengalami tren meningkat dari 0,24 pada tahun 2019 menjadi 0,29 pada tahun 2023.

**Tabel 4.9 Average Propensity to Consume (APC) dan Average Propensity to Save (APS)
Kota Banjarbaru, 2019—2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	4.822,37	4.830,50	4.993,27	5.664,60	6.235,98
Konsumsi LNPRT (ADHB) (Miliar Rp)	203,66	198,88	205,34	224,64	257,04
Konsumsi Pemerintah (ADHB) (Miliar Rp)	2.308,04	2.316,78	2.513,68	2.598,34	2.905,56
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	7.334,07	7.346,16	7.712,29	8.487,58	9.398,58
APC	0,76	0,77	0,77	0,72	0,71
Tabungan (Miliar Rp)	2.367,04	2.192,30	2.290,79	3.298,80	3.929,51
APS	0,24	0,23	0,23	0,28	0,29

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

4.10

INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter nilai tambah.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak K unit. Formulasnya :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t
 Y_t = Output tahun ke t
 Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Pada **Tabel 3.25** dapat dilihat bahwa tahun 2019 besaran ICOR Kota Banjarbaru mencapai 6,91. Dari angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa untuk meningkatkan output sebanyak 1 unit diperlukan penambahan kapital sebanyak 6,91 unit. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru mengalami kontraksi sehingga perubahan PDRB menjadi negatif. Kondisi tersebut menunjukkan perbaikan pada tahun 2021, yang mana ekonomi Kota Banjarbaru kembali tumbuh positif sehingga ICOR tercatat positif sebesar 13,41. Pada tahun 2022 dan 2023, ICOR masih bernilai positif, yakni 5,70 dan 6,47. Hal ini berarti pada tahun 2022 diperlukan penambahan kapital sebanyak 5,70 unit untuk kenaikan 1 unit output dan pada tahun 2023 diperlukan penambahan kapital sebanyak 6,47 unit untuk kenaikan 1 unit output

Secara rata-rata, dari tahun 2021 hingga 2023 besaran ICOR Kota Banjarbaru mencapai 8,53. Dari angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa untuk meningkatkan output sebanyak 1 unit diperlukan penambahan kapital sebanyak 8,53 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka rata-rata ICOR tahun 2021 – 2023, dapat dikatakan cukup efisien dengan selisih 1,68.

**Tabel 4.10 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Kota Banjarbaru, 2019—2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	6.232,67	6.118,39	6.321,84	6.823,28	7.288,18
Perubahan (Miliar Rp)	399,48	-114,28	203,46	501,44	465,90
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	2.761,12	2.700,00	2.728,46	2.858,34	3.015,20
ICOR	6,91	-23,63	13,41	5,70	6,47

Catatan : * Angka sementara

**Angka sangat sementara

BAB V

PENUTUP



[kota.bps.go.id](http://www.kota.bps.go.id)

Munculnya pandemi ditandai dengan pengumuman pertama kalinya ditemukan kasus COVID-19 pada awal tahun 2020. Pada tahun 2023 pasca pandemi, aktivitas masyarakat di Kota Banjarbaru mulai pulih. Geliat aktivitas publik menandai bangkitnya perekonomian masyarakat secara umum. Baik dari kelompok rumah tangga, Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT), Pemerintah dan Perusahaan. Pembangunan kembali berjalan setelah sebelumnya sempat tersendat. Meski demikian, sebagian aktivitas yang erat pada saat pandemi seperti pertemuan melalui ruang virtual masih tetap dimanfaatkan hingga saat ini. Perubahan pada konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah), PMTB, dan aktivitas ekspor dan impor, semua terekam dalam publikasi ini.

PDRB menurut pengeluaran tahun 2019—2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Banjarbaru pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), dan Tabel Input-Output.

Data tentang interaksi dengan luar daerah (external account) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota terhadap ekonomi luar daerah.

Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018 sampai dengan 2022, sehingga mampu menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data. Data PDRB Kota Banjarbaru dari sisi pengeluaran ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya, serta melengkapi indikator ekonomi makro lainnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tahun 2023 masih menjadi tahun untuk beradaptasi dari pandemi setelah kehadirannya sejak tahun 2020. PDRB Kota Banjarbaru tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 13,33 triliun rupiah. Dilihat dari sisi pengeluaran, sebagian besar dari nilai tersebut digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPR dan pemerintah, yang secara agregat mencapai 70,52 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru tahun 2023 mencapai 6,81 persen, melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 7,93 persen. Adapun indeks implisit PDRB Kota Banjarbaru pada tahun ini mencapai 182,87 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 172,74. Begitupula dengan laju implisit PDRB Kota Banjarbaru tahun 2023 ini, mampu mencapai 5,87 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 9,17 persen.

Saling dukung antara Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mewujudkan percepatan pemulihan pasca pandemi. Termasuk pula disini aktivitas dari berbagai lembaga non-profit yang sedari awal cepat tanggap melaksanakan aksi sosial di tengah masyarakat. Kerjasama ini akan melahirkan optimisme di tengah masyarakat bahwa Kota Banjarbaru dapat bangkit menuju kondisi yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- International Monetary Fund. 2023. World Economic Outlook Update. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/world-economic-outlook-update-january-2024>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2024. Harga Batubara Acuan. Diakses pada 16 Maret 2024. https://www.minerba.esdm.go.id/harga_acuan.
- Sipayung, Ronald S.G.S.2024. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024. Diakses pada 13 Maret 2024. <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024>.
- Tim Penerjemah SNA 2008 Badan Pusat Statistik. 2008. Sistem Neraca Nasional 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- World Bank.2024. Commodity Markets.Diakses pada 14 Maret 2024. <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.

LAMPIRAN



www.kota.bps.go.id

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjarbaru
Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Milyar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.822,37	4.830,50	4.993,27	5.664,60	6.235,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	203,66	198,88	205,34	224,64	257,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.308,04	2.316,78	2.513,68	2.598,34	2.905,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.082,63	4.014,71	4.113,81	4.553,49	4.985,23
5. Perubahan Inventori	49,27	2,96	3,88	-40,55	-85,82
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.764,86	-1.825,38	-1.826,89	-1.214,13	-969,89
PDRB	9.701,10	9.538,46	10.003,08	11.786,38	13.328,09

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Banjarbaru
Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Milyar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.444,37	3.418,85	3.451,19	3.641,54	3.844,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	132,49	127,59	128,74	135,54	147,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.431,05	1.389,18	1.470,70	1.454,48	1.570,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.761,12	2.700,00	2.728,46	2.858,34	3.015,20
5. Perubahan Inventori	32,44	2,10	2,74	-25,71	-51,39
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.568,80	-1.519,34	-1.459,99	-1.240,92	-1.237,82
PDRB	6.232,67	6.118,39	6.321,84	6.823,28	7.288,18

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49,71	50,64	49,92	48,06	46,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,10	2,09	2,05	1,91	1,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23,79	24,29	25,13	22,05	21,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	42,08	42,09	41,13	38,63	37,40
5. Perubahan Inventori	0,51	0,03	0,04	-0,34	-0,64
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-18,19	-19,14	-18,26	-10,30	-7,28
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 = 100 Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,42	-0,74	0,95	5,52	5,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,72	-3,70	0,90	5,29	8,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,39	-2,93	5,87	-1,10	7,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,18	-2,21	1,05	4,76	5,49
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1,44	-3,15	-3,91	-15,00	-0,25
PDRB	6,85	-1,83	3,33	7,93	6,81

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	140,01	141,29	144,68	155,55	162,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	153,71	155,88	159,51	165,73	174,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	161,28	166,77	170,92	178,64	185,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	147,86	148,69	150,77	159,31	165,34
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	112,50	120,14	125,13	97,84	78,35
PDRB	155,65	155,90	158,23	172,74	182,87

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010
= 100 Kota Banjarbaru Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,89	0,92	2,40	7,51	4,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,13	1,41	2,33	3,90	5,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,55	3,40	2,48	4,52	3,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,70	0,56	1,40	5,66	3,79
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	0,09	6,80	4,15	-21,81	-19,92
PDRB	3,95	0,16	1,50	9,17	5,87

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://banjarbarukota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANJARBARU**
BPS-Statistics of Banjarbaru Municipality

Jalan P. Suriansyah Ujung RT 001 RW 005, Banjarbaru 70714
Email: bps6372@gmail.com. Website: <http://banjarbarukota.bps.go.id>

